

PENCABUTAN SEBAGIAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PENETAPAN TANAH TELANTAR

Nama : Rusell
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum
Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Diiberikannya hak atas tanah kepada masyarakat tentunya juga menimbulkan kewajiban bagi masyarakat untuk memelihara tanahnya atau tidak menelantarkan tanahnya. Upaya pemerintah untuk menertibkan tanah telantar adalah dengan mengeluarkan penetapan tanah telantar. Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar mengenal pencabutan hak atas tanah sebagian sebagai akibat penetapan tanah telantar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah pencabutan hak atas tanah sebagian sebagai akibat penetapan tanah telantar dapat dilakukan ditinjau berdasarkan peraturan perundang - undangan mengenai pertanahan nasional dan konsep - konsep dalam hukum administrasi. Berdasarkan peraturan perundang - undangan dan konsep dalam hukum administrasi, pencabutan hak atas tanah sebagian tidak dapat dilakukan dikarenakan pencabutan hak atas tanah sebagian dapat memberikan beban lebih kepada pemilik tanah.

Kata Kunci: Tanah Telantar, Penetapan, dan Pencabutan Hak

PARTIAL REVOCATION OF LAND RIGHTS DUE TO STIPULATION OF ABANDONED LAND

Name : Rusell

Dicipline/Study Programme : Law/Legal Study

Contributors : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum
Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Granting land rights to the community, of course, also creates an obligation for the community to maintain their land or not to abandon their land. The government's effort to control abandoned land is by issuing a determination of abandoned land. Article 30 Paragraph (2) Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Control of Abandoned Lands and Areas recognizes the partial revocation of land rights as a result of the determination of abandoned land. This study is intended to analyze whether partial revocation of land rights as a result of the determination of abandoned land can be carried out in terms of the laws and regulations regarding national land and concepts in administrative law. Based on statutory regulations and concepts in administrative law, partial revocation of land rights as a result of the stipulation of abandoned land cannot be carried out because the partial revocation of land rights can place an additional burden on the land owner.

Keywords: *Abandoned Land, Determination, and Revocation of Rights*